

Rustono:

# Kebijakan Zonasi Sudah Ideal

Penerimaan siswa baru jadi perhatian utama orang tua. Kuota penerimaan dibagi tiga jalur; 90 persen zonasi, lima persen prestasi, dan lima persen jalur perpindahan dinas orang tua. Zonasi membuat siswa bernilai di atas rata-rata harus berada peruntungan dengan siswa bernilai di bawah rata-rata ketika jarak terpendek ke sekolah jadi penentu. Bagaimana permasalahan dan implikasi yang muncul? Berikut perbincangan wawancara *Suara Merdeka* Hari Santoso dengan Ketua Dewan Pendidikan Jawa Tengah Prof Dr Rustono MHum.



SM Hari Santoso

**B**agaimana penilaian Dewan Pendidikan mengenai penerimaan siswa baru saat ini?

Proses itu berkaitan sekali dengan aspek membangun dunia pendidikan yang berkualitas. Semangatnya juga sudah sangat terlihat. Pemerintah

mengedepankan zonasi dengan keinginan memberikan pelayanan merata di bidang pendidikan dasar dan menengah. Konsep itu ideal untuk memberikan pelayanan dasar akan kebutuhan edukasi.

*Seperti apa sistem yang paling ideal?*

Mencermati semangatnya, penerimaan siswa baru kali ini sudah sangat ideal. Ada tatanan yang ingin diwujudkan untuk melayani kebutuhan bersama masyarakat. Itu juga berkenaan pelayanan merata di bidang pendidikan. Sistem itu membuat tidak ada lagi pengotakan sekolah atau satuan pendidikan. Kelak istilah tempat pendidikan favorit, unggulan, banyak diminati, dan sebagainya akan terkikis dengan perjalanan sistem yang baik. Atau, sebaliknya juga tak boleh ada sebutan sekolah negeri pinggir, kurang banyak dilirik, apalagi sepi peminat.

*Jika zonasi menjadi pertimbangan utama, apakah tidak membuat siswa nglokro belajar karena jarak rumah lebih*

*menentukan daripada nilai?*

Secara objektif saya melihat itu bukan ganjalan. Sebab, yang berprestasi tentu tetap bisa mendaftar di sekolah pilihan. Mereka bisa berkompetisi secara sehat dan terbuka. Bukan berarti dengan sistem zonasi sekolah secara asal-asalan menerima siswa.

Murid-murid juga tetap boleh mendaftar di sekolah berbeda sesuai dengan keinginan. Justru yang harus disampaikan, sistem itu bukan untuk membuat para siswa kehilangan semangat, melainkan mendorong seluruh masyarakat menerima hak mendapat pendidikan yang merata dan berkualitas.

*Apakah zonasi bisa dipastikan akan efektif untuk pemerataan?*

Efektivitas kebijakan semacam itu tentu butuh waktu dalam pelaksanaan. Tentu juga disertai penyempurnaan aturan yang menunjang. Sebagaimana, misalnya, syarat tentang kartu keluarga atau surat keterangan domisili.

Kami tidak menutup mata melihat masih ada polemik yang dirasakan masyarakat. Berbagai hal yang berkait dengan kebijakan zonasi juga harus sinkron dan saling dukung.

Namun prinsipnya kebijakan yang lahir melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) kemudian diturunkan dalam peraturan gubernur, wali kota,

BUPATI, dan sebagainya adalah untuk kepentingan publik. Jadi seharusnya memberikan manfaat besar. Bukan malah menimbulkan ketidakpastian.

*Bagaimana penerimaan siswa baru yang ideal saat ini?*

Penerimaan siswa baru sudah bersemangat pemerataan layanan pendidikan. Hanya sempat muncul dinamika. Peraturan Mendikbud Nomor 51 Tahun 2018 sekaligus mencantumkan sistem zonasi 90 persen, prestasi maksimal lima persen, dan perpindahan orang tua maksimal lima persen yang akhirnya memunculkan pertimbangan di tingkat daerah, sehingga diperbolehkan ada surat keterangan domisili.

Namun dalam peraturan Mendikbud sebenarnya sudah diatur menggunakan syarat kartu keluarga minimal satu tahun di lokasi sesuai dengan sekolah tujuan. Sebenarnya kalau cukup menggunakan kartu keluarga sesuai dengan ketentuan, sepertinya tidak ada masalah. Persoalannya, surat keterangan domisili disalahgunakan atau dimanipulasi untuk memuluskan siswa masuk ke sekolah pilihan mereka.

*Di beberapa daerah ditengarai sekolah negeri justru kekurangan murid dengan pemberlakuan pola zonasi?*

Ya, kalau mencermati persoalan ini, bisa jadi ada kekurangan dalam memperhitungkan sistem zonasi atau siswa

mendaftar saat terakhir. Pemerintah daerah seharusnya sudah bisa mengetahui jumlah lulusan dan ketersebarannya. Kemudian memperhitungkan dengan jumlah dan daya tampung sekolah. Kalau semua sudah terdata dengan baik tentu bisa memenuhi harapan.

Sekolah juga tidak akan kekurangan siswa. Sebab, kami melihat, lulusan sekolah sangat tinggi, sedangkan jumlah sekolah negeri terbatas. Seleksi melalui ranking, prestasi, zonasi, dan sebagainya bukankah pula karena daya tampung sekolah negeri yang terbatas sehingga dibuat kompetisi sehat. Dengan sistem zonasi yang tepat pula, sekolah akan terbagi merata melayani kebutuhan pendidikan untuk masyarakat.

*Adakah kebijakan penunjang lain supaya penerimaan siswa baru lebih mencerminkan keadilan?*

Salah satunya lebih menekankan pemakaian kartu keluarga. Hal itu terutama untuk

mengantisipasi penyalahgunaan surat keterangan domisili. Sebenarnya kalau sudah sesuai dengan ketentuan itu, pelaksanaan penerimaan siswa baru akan lebih baik.

*Seberapa jauh peran Dewan Pendidikan, terutama di Jawa Tengah, mendorong penerimaan peserta didik makin berkualitas baru dari waktu ke waktu?*

Kami tentu berada pada porsi untuk tanpa henti mendukung tercipta dunia pendidikan yang bermutu, merata untuk semua lapisan masyarakat, dan berkeadilan. Seluruh masyarakat Indonesia, termasuk di Jawa Tengah, harus mendapat kepastian dan akses masuk ke dunia pendidikan. Tak kurang, kami menjangkau aspirasi, masukan, laporan, kritik, saran untuk bisa menjaga dan membantu terbentuk dunia pendidikan yang bermutu. Aspirasi itu kami sampaikan ke pemangku kepentingan, yakni gubernur, dinas pendidikan, dan lain-lain. (28)

**Prof Dr Rustono MHum**

Lahir: Brebes, 27 Januari 1958

**Pendidikan**

- S-1 Institut Keguruan Ilmu Pendidikan (IKIP) Negeri Semarang
- S-2 Universitas Indonesia (UI) Jakarta
- S-3 UI Jakarta

**Kepakaran**

- Ilmu pendidikan bahasa Indonesia, pragmatik, sintaksis, morfologi.

**Buku**

- Pokok-pokok Pragmatik (2008)
- Implikatur Tutaran Humor (2009)

**Jabatan/Aktivitas**

- Pernah menjabat Wakil Rektor Unnes
- Ketua Dewan Kesenian Jawa Tengah 2012
- Ketua Dewan Pendidikan Jawa Tengah
- Rektor Universitas Ivet.



(H41-28)



**Gayeng Bareng**  
Oleh Sasongko Tedjo

## BPJS

*Sugeng enjang, Sedherek-sedherek.*

Orang Indonesia paling suka bikin singkatan. Singkatan itu pun sering dipelesetkan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dipelesetkan menjadi Belanja Pas-pasan Jahitan Sosialita. Itu untuk menyindir orang yang suka bergaya hidup mewah, padahal penghasilan taqk mendukung.

Dalam kenyataan, BPJS Kesehatan yang dulu bernama Askes dalam arti sebenarnya adalah lembaga asuransi yang justru bisa memberikan pelayanan "mewah" kepada masyarakat, terutama yang kurang mampu atau berpenghasilan pas-pasan. Kakak saya pernah operasi memasang ring jantung dengan biaya lebih dari Rp 120 juta. Namun hanya membayar "administrasi" ratusan ribu rupiah.

Tentu banyak sekali warga masyarakat tertolong ketika

harus dirawat di rumah sakit. Tanpa BPJS, bisa babak belur.

Masih sekitar pasang ring jantung, bulan lalu seorang teman mendadak kena serangan jantung dan harus langsung pasang ring. Sebelum meninggalkan rumah sakit, dia harus melunasi pembayaran biaya operasi dan rawat inap lebih dari Rp 180 juta. Padahal, dia belum ikut BPJS atau asuransi lain. Wah, wah, betapa menyedal.

BPJS bak pahlawan ketika menolong orang sakit. Bandingkan dengan ketika membayar premi relatif kecil. Aparatur sipil negara (ASN) dan keluarga malah gratis, dibayarkan negara. Pegawai swasta pun demikian karena undang-undang mewajibkan. Tak boleh ada lagi cerita seperti zaman dulu, orang sakit malah parah karena memikirkan biaya sangat mahal. Ada pula ungkapan orang miskin tak boleh sakit. Sekarang sudah ada BPJS. Di Solo, PMI saja berani menantang, "Anda sakit dan tak mampu berobat? Datanglah pada kami." *Rrruaaar biasa.*

\*\*\*

**CITRA** Askes dulu, pelayanan serbalambat, rumit, dan kadang "pilih kasih". Namun sekarang sudah berubah. BPJS tampil lebih profesional, tanpa membedakan siapa

pasien. Walau tentu masih banyak kekurangan di sana-sini. Kesan itulah yang saya dapat ketika kali pertama memakai jasa BPJS. Anak saya sakit telinga dan diperiksa ahli THT dr Zulfikar Naftali. Dokter pun menyarankan menggunakan BPJS karena beberapa tindakan yang akan dilakukan

berbiaya tinggi. Itulah awalnya, sehingga saya mengenal BPJS dengan pelayanan wah, walau premi "murah".

Pelayanan pendaftaran di setiap rumah sakit tersedia dan bahkan dikhussuskan. Di RS Kariadi Semarang, mayoritas pasien BPJS. Pelayanan pun relatif cepat. Ketika mengambil nomor antrian 271, padahal yang dipanggil masih di bawah 150, saya kehilangan nyali. Ternyata dengan 10 loket tak sampai 25 menit selesai. Petugas pun dari satpam sampai bagian informasi dan lain-lain tak hanya ramah, tetapi juga dibekali *product knowledge* yang baik. Jangan khawatir, ada juga ruang pengaduan dan BPJS Center di sekelilingnya.

Inilah pelayanan wah ke masyarakat, tanpa membedakan latar belakang sosial ekonomi. Ini bukan testimoni pesanan lo. Namun saya melihat dan merasakan

bagaimana berbagai pembenahan pelayanan kesehatan mesti diapresiasi. Ada tempat *nge-charge* HP, ada pula permen di loket seperti di *customer service bank*.

Yang membedakan, tempat duduk selalu penuh sesak, sehingga ruang ber-AC pun tak terasa dingin. Maklum, ini pelayanan umum yang benar-benar dibutuhkan rakyat.

\*\*\*

**SAYANG**, BPJS lagi bermasalah. Defisit triliunan rupiah dan rumah sakit teriak karena tagihan menumpuk, belum terbayar. Sampai-sampai Presiden Jokowi turun tangan. Ada mismanajemen atau inefisiensi atau hitungan bisnisnya tak masuk. Harus ada audit internal. Jika premi harus naik, ya tak perlu takut.

Usai pemilu dan terbentuk pemerintahan baru, tak perlu lagi ragu melangkah. Periode lima tahun ke depan fokus membangun manusia. Nah, kesehatan dan pendidikan itu basis. BPJS ibarat jawaban dari kebutuhan.

*Mangga, Sedherek-sedherek.* Kita perlu mendukung pemerintahan yang melayani kebutuhan rakyat. Seperti jargon pemimpin di Jawa Tengah yang selalu ingin *gawe wong cilik gumuyu*. Maka kebutuhan mendasar yang harus diutamakan. Tak cukup slogan *mboten korupsi mboten ngapusi* ala Pak Ganjar, meski itu juga keren.

Karena, ituu belum yentuh dan membumi. Yang benar harus ditambah: *mboten kesupen ngayahi*, termasuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan. (28)

## SUARA MERDEKA

Terbit sejak 11 Februari 1950

PT Suara Merdeka Press

Pendiri : H Hetami

Komisaris Utama : Ir Budi Santoso

Pemimpin Umum: Kukrit Suryo Wicaksono

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Gunawan Permadi

Direktur Pemberitaan : Amir Machmud NS  
Direktur HRD dan Training Center : Sara Ariana Fiestri

**Wakil Pemimpin Redaksi :** Agus Toto Widyatmoko, Triyanto Triwikromo. **Redaktur Senior :** Sasongko Tedjo, Hendro Basuki, A Zaini Bisri, Heryanto Bagas Pratomo, Prie GS. **Redaktur Pelaksana :** Hartono, Edy Muspriyanto, Saroni Asikin, Hasan Fikri. **Koordinator Liputan :** Rukardi, Nugroho Dwi Adiseno. **Staf Redaksi :** Darjo Soyat, Bambang Tri Subeno, Simon Dodit, Budi Suro, Dwi Ani Retnowulan, Renny Martini, Diah Irawati, Gunarso, Ahmad Muhaimin, Bina Septriono, Edi Indarto, Sri Syamsiyah LS, Gunawan Budi Susanto, Arwan Pursidi, Agus Fathudin Yusuf, Petrus Heru Subono, Tavif Rudiyanto, M Jokomono, Purwoko Adi Seno, Karyadi, Mohammad Saronji, Maratun Nashihah, Sarby SB Wietha, Mohamad Annas, Kunadi Ahmad, Ida Nursanti, Aris Mulyawan, Setyo Sri Mardiko, Budi Winarto, Sasi Pujiati, Rony Yuwono, Noviar Yudho P, Saptono Joko S, Roosalina, Dicky Priyanto, Tri Budianto, Wahyu Wijayanto, Dian Chandra TB, Leonardo Agung Budi Prasetya, Adhitha Amritrianto, Hartatik, Fani Ayudea, Imam Nuryanto, M Hafids, Valentina Esti. **Litbang :** Djurianto Prabowo (Kepala). **Pusat Data, Analisa dan Produksi :** Dadang Aribowo (Kepala). **Personalia :** Joko Catur WH, Endang Ristriyani. **Redaktur Artistik :** Toto Tri Nugroho (Koordinator), Putut Wahyu Widodo, Joko Sunarto, Djoko Susilo, Farid Surya Madjid, Iwan Joko Prasetyo, Hangga Perdana Putra. **Reporter Biro Semarang :** Fahmi Z Mardizansyah (Kepala), Hendra Setiawan (Wakil Kepala), Irawan Aryanto, Surya Yuli, Moh Kundori, Rosyid Ridho, Yuniarto Hari Santosa, Maulana M Fahmi, Modesta Fiska Diana, Royce Wijaya Setya Putra, Hasan Hamid. **Biro Jakarta :** Budi Nugraha (Kepala), Wahyu Atmadji, Fauzan Djazadi, Budi Yuwono, Hartono Harimurti, Tresnawati, RM Yunus Bina Santosa, Saktia Andri Susilo, Kartika Runiasari, Mahendra Bungalan Dharmabrata, Wisnu Wijarnako. **Biro Surakarta :** Sri Hartanto (Kepala), Won Poenvono, Joko Dwi Hastanto, Sri Wahyudi, Anindito Adi Nugroho, Merawati Sunantri, Setyo Wiyono, Wisnu Kisawa, Achmad Husain, Djoko Murdowo, Langgeng Widodo, Yusuf Gunawan, Evi Kusninda, Budi Santoso, Irfan Salafudin, Heru Susilowibowo, Basuni Hariwoto, Khalid Yogi Putranto. **Biro Banyumas :** Sigit Oediarto (Kepala), Khoerudin Islam, Budi Hartono, Agus Sukaryanto, RP Arief Nugroho, Agus Wahyudi, M Syarif SW, Mohammad Sobirin, Bahar Ibnu Hajar, Budi Setyawan. **Biro Pantura :** Nur Khoerudin (Kepala), Trias Purwadi, Wahidin Soedja, Saiful Bachri, Arif Suryoto, Riyono Toepira, M Achid Nugroho, Wawan Hudiyanto, Cessna Sari, Bayu Setiawan, Teguh Inpras Tribowo, Ali Arifin. **Biro Muria :** Prayitno (Kepala), Djamal AG, Urip Daryanto, Sukardi, Abdul Muiz, Anton Wahyu Hartono, Mulyanto Ari Wibowo, Moch Noor Elendi. **Biro Kedu/DIY :** Edy Purnomo (Kepala), Eko Priyono, Supriyanto. **DI Yogyakarta :** Agung Priyo, Amelia Hapsari. **Bandung :** Dwi Setiadi. **Kepala Kantor Wilayah :** Akbar Hendra Arianto (Koordinator), Doni Setyo Nugroho (Semarang), Surya Yuli (Surakarta), Edi Purnomo (Kedu), Kurniawan Sutrisno Hadi (Banyumas), Agatha Asri W (Pantura), Ariyanto (Muria). **Alamat Redaksi :** Jl Kawi 20 Semarang 50249. Faks: (024) 6580605. **Alamat Redaksi Kota/Sirkulasi :** Jl Merak No 11A Semarang 50241. Telepon: (024) 8412600. **Managing Director :** Indra Jaya Sihombing. **Direktur Operasional :** Heru Djatmiko, **Wakil Direktur Operasional :** Yoyok Gumulya. **Direktur Keuangan & Pembukuan :** Sumardi Suherman. **Direktur Sales & Komunikasi :** Bambang Pulunggono, **Wakil Direktur Sales & Komunikasi :** Agustina Purbandini. **Senior Manager HRD :** Hudawi. **Senior Manager Sales Product :** M Eko Fitrianto. **Senior Manager General Affair :** Bambang Supriyanto. **Senior Manager Internal Audit :** Ari Santoso. **Kepala Newsroom Digital :** Ananto Pradono. **Alamat Iklan/Tata Usaha :** Jl Kawi 20 Semarang 50252. Faks: (024) 86400570, 86400565. **HOT LINE 24 JAM :** (024) 8454333 **REDAKSI :** (024) 6580900 Faks (024) 6580605 **EMAIL REDAKSI :** red\_sumer@yahoo.com. Dicitak oleh PT Media Nusantara Press, isi di luar tanggung jawab percetakan.